

**ANALISIS PENGARUH TINGKAT KEKAYAAN DAERAH, BELANJA  
DAERAH, UKURAN PEMERINTAH DAERAH, *LEVERAGE* DAN  
*INTERGOVERNMENTAL REVENUE* TERHADAP KINERJA  
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

**(Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah/Kota Se-Jawa Tengah 2011-2013)**



**NASKAH PUBLIKASI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

**Disusun Oleh :**

**RENY RETNOWATI**

**B 200 120 235**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2016**

**ANALISIS PENGARUH TINGKAT KEKAYAAN DAERAH, BELANJA  
DAERAH, UKURAN PEMERINTAH DAERAH, *LEVERAGE* DAN  
*INTERGOVERNMENTAL REVENUE* TERHADAP KINERJA  
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
(Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah/Kota Se-Jawa Tengah 2011-2013)**

**RENY RETNOWATI**

B 200 120 235

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta

E-mail : [reny\\_retnowati@yahoo.co.id](mailto:reny_retnowati@yahoo.co.id)

**ABSTAKSI**

Pemerintah daerah dituntut untuk mampu menghasilkan kinerja keuangan yang baik agar masyarakat mampu menilai kinerja pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat kekayaan daerah, belanja daerah, ukuran pemerintah daerah, *leverage* dan *intergovernmental revenue* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Data penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu laporan keuangan pemerintah daerah/kota se-Jawa Tengah tahun 2011-2013 yang telah dipublikasikan di [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id). Metode pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *purposive* sampling. Sampel dalam penelitian ini yaitu sebanyak 60 kabupaten/kota selama 2011-2013. Penelitian ini menggunakan model analisis regresi linear berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja daerah dan ukuran pemerintah daerah merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan tingkat kekayaan daerah, *leverage*, dan *intergovernmental revenue* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kata kunci: *tingkat kekayaan daerah, belanja daerah, ukuran pemerintah daerah, leverage, intergovernmental revenue, kinerja keuangan pemerintah daerah.*

## HALAMAN PENGESAHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini telah membaca naskah publikasi dengan judul:

**ANALISIS PENGARUH TINGKAT KEKAYAAN DAERAH, BELANJA  
DAERAH, UKURAN PEMERINTAH DAERAH, *LEVERAGE* DAN  
*INTERGOVERNMENTAL REVENUE* TERHADAP KINERJA  
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
(Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah/Kota Se-Jawa Tengah 2011-2013)**

Yang di tulis oleh:

**RENY RETNOWATI**

**NIM : B 200 120 235**

Penandatanganan berpendapat bahwa naskah publikasi tersebut telah memenuhi syarat untuk diterima.

Surakarta, Februari 2016

Pembimbing



**(Dra. Nursiam, M.H., Ak, CA)**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



  
**(Dr. Triyono, SE, M.Si)**

## PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah merupakan pihak yang menjalankan roda perekonomian, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang dituntut untuk dapat melaksanakan pemerintahan secara transparan dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan agar tercipta pemerintahan yang bersih (Setyaningrum, 2012). Pemerintah Daerah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomer 23 Tahun yang menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Serta UU No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada Pemerintah Daerah yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah (Mahsun, 2006)

Otonomi daerah dilaksanakan agar daerah dapat menangani urusan pemerintahan didasarkan tugas, wewenang dan kewajiban senyatanya, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Semakin besar peran pemerintah daerah, maka dibutuhkan pengukuran kinerja yang sistematis untuk mengukur pencapaian penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pengukuran kinerja merupakan metode yang digunakan untuk menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga kemajuan dari organisasi dapat terlihat. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah sangat berbeda dengan pengukuran kinerja keuangan perusahaan. Selain berbasis anggaran, keuangan pemerintah daerah tidak memiliki tujuan untuk memaksimalkan keuntungan atau laba (*profits* atau *net income*), meskipun ada sebutan surplus atau defisit untuk selisih antara pendapatan dan belanja. Surplus/defisit menunjukkan selisih antara pendapatan dan belanja, baik di anggaran (APBD) maupun laporan realisasi anggaran (LRA).

Pengelolaan keuangan daerah tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia yang handal, tetapi juga harus didukung oleh kemampuan keuangan daerah yang memadai. Kemampuan keuangan daerah salah satunya dapat dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber utama dalam melaksanakan otonomi daerah. Setiap daerah berusaha untuk memaksimalkan potensi yang ada pada setiap daerahnya agar PAD yang didapat meningkat.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan Mustikarini (2012) yang menggunakan variabel ukuran tingkat kekayaan daerah, ukuran pemerintah daerah, dan belanja daerah. Sedangkan *leverage* dan *intergovernmental revenue* merujuk pada penelitian Sosetyaningtyas (2012).

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah tingkat kekayaan daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah belanja daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?

3. Apakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
5. Apakah *intergovernmental revenue* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?

## **LANDASAN TEORI**

### **Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Mahsun (2006) mendefinisikan kinerja merupakan pencapaian dari pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan tujuan dari organisasi. Pengukuran kinerja berarti penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sejak diterapkannya penganggaran berbasis kinerja, semua pemerintah daerah dituntut untuk mampu menghasilkan kinerja keuangan pemerintah daerahnya secara baik.

### **Kekayaan Daerah**

Kekayaan daerah menggambarkan tingkat kemakmuran suatu daerah (Sinaga, 2011 dalam Setyaningrum, 2012). Sumber kekayaan daerah yang utama yaitu Pendapatan Asli Daerah. PAD digunakan untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-program pembangunan daerah. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat serta menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.

### **Belanja Daerah**

PSAP No.2 Paragraf 7, mengatur bahwa belanja daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Menurut UU No. 32/2004 Pasal 167 ayat 1, belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

### **Ukuran Pemerintah Daerah**

Ukuran pemerintah daerah menunjukkan seberapa besar organisasi tersebut (Setyaningrum & Febriani, 2012). Sesuai dengan penelitian Waliyyani & Amir (2015); Pratama et.al (2015); Kusumawardani (2012); dan Setyaningrum & Febriani (2012) bahwa ukuran pemerintah daerah dapat dilihat dari total aset yang dimiliki. Menurut Waliyyani & Amir (2015), semakin besar aset yang dimiliki maka suatu daerah akan semakin kompleks dalam menjaga dan mengelola asetnya

### ***Leverage***

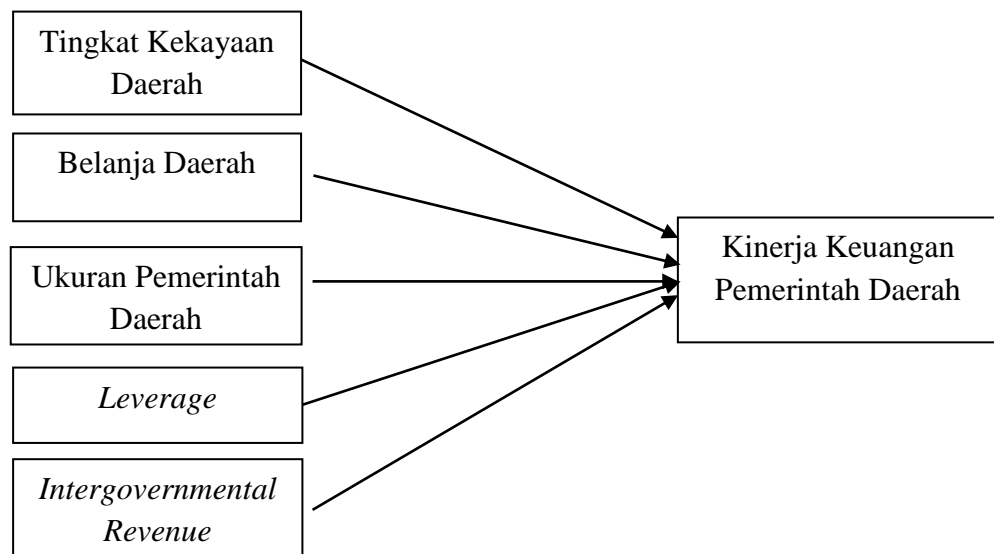
*Leverage* merupakan perbandingan antara utang dan modal (Kusumawardani, 2012). Sehingga dapat dikatakan *leverage* merupakan besarnya aset daerah yang dibiayai oleh utang karena daerah tidak mampu membiayai urusan daerahnya melalui modal sendiri. Semakin tinggi tingkat *leverage* menandakan kinerja

pemerintah semakin buruk, karena pemerintah dianggap tidak mampu mengelola pendapatan untuk belanja daerahnya dengan baik.

### ***Intergovernmental Revenue***

*Intergovernmental revenue* atau biasa disebut dengan tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, yaitu besarnya jenis pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari transfer pemerintah pusat kepada Pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah daerah (Patrik, 2007 dalam Setyaningrum & Febriyani 2012). Dana dari pemerintah pusat biasanya diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan.

### **Kerangka Pemikiran**



### **Pengembangan Hipotesis**

#### **a. Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah**

Kekayaan daerah menggambarkan tingkat kemakmuran suatu daerah (Sinaga dalam Setyaningrum, 2012). Menurut Pratama et.al (2015) dan Mustikarini (2012) kekayaan daerah dapat dilihat dari besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Julitawati et.al (2012) peningkatan PAD akan mengakibatkan peningkatan kinerja keuangan daerah. Menurut Julitawati et.al (2012), semakin tinggi kekayaan daerah maka kinerja keuangan pemerintah daerah semakin bagus. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis pada penelitian ini adalah :

H1 : Tingkat kekayaan daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah.

#### **b. Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah**

Pratama et.al (2015) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak, dan mengembangkan sistem jaminan sosial. Semakin tinggi

belanja daerah, pemerintah daerah akan memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkualitas kepada masyarakatnya. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis pada penelitian ini adalah :

H2 : Belanja daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah.

**c. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah**

Kusumawardani (2012) menyebutkan bahwa ukuran pemerintah daerah dapat dilihat dari total aset yang dimiliki. Pengukuran dengan total aset karena dianggap relatif stabil bila dibandingkan dengan nilai penjualan dan kapitalisasi pasar dalam mengukur size perusahaan (Nasser, 2009 dalam Kusumawardani, 2012). Semakin besar ukuran pemerintah daerah, maka semakin tinggi kinerja yang dimiliki daerah tersebut. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis pada penelitian ini adalah :

H3 : Ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah.

**d. Pengaruh *Leverage* Terhadap Kinerja Keuangan Daerah**

*Leverage* merupakan besarnya aset daerah yang dibiayai oleh utang karena daerah tidak mampu membiayai urusan daerahnya melalui modal sendiri. Menurut Sumarjo (2010) dalam Kusumawardani (2012) bahwa semakin besar *leverage* yang dimiliki oleh suatu entitas maka kinerjanya semakin buruk atau sebaliknya. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis pada penelitian ini adalah :

H4: *Leverage* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

**e. Pengaruh *Intergovernmental Revenue* Terhadap Kinerja Keuangan Daerah**

*Intergovernmental Revenue* adalah sejumlah transfer dana dari pusat yang sengaja dibuat untuk membiayai program-program pemerintah daerah, atau biasa disebut dengan dana perimbangan. Hasil penelitian sumarjo (2010) membuktikan bahwa *intergovernmental* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Artinya bahwa semakin tinggi *intergovernmental revenue* semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis pada penelitian ini adalah :

H5: *Intergovernmental Revenue* berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah.

## **METODE PENELITIAN**

### **Populasi, Sampel, dan Metode Pengambilan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada tahun 2011-2013. Penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel dengan kriteria tertentu. Sampel yang dipilih adalah yang memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah/Kota di Jawa Tengah pada tahun 2011-2013 yang telah menerbitkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

2. Pemerintah Daerah/Kota di Jawa Tengah yang mempublikasikan Laporan Keuangan yang memiliki Neraca untuk mendapatkan total aset, total utang dan total modal yang dimiliki oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun anggaran 2011-2013.
3. Pemerintah daerah/kota di Jawa Tengah yang mempublikasikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk mendapatkan PAD, dana perimbangan, total realisasi Belanja, total realisasi pendapatan, realisasi penerimaan dan realisasi pengeluaran tahun anggaran 2011-2013.

## **Variabel Penelitian dan Pengukurannya**

### **Variabel Dependen**

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan pemerintah daerah. Pengukuran kinerja pemerintah daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Moore, 2003 dalam Sumarjo 2010). Berdasarkan Mardiasmo (2002 : 133), pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah diukur dengan rumus :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran (Output)}}{\text{Realisasi Penerimaan (Input)}}$$

### **Variabel Independen**

#### **Tingkat Kekayaan Daerah**

Pada penelitian Mustikarini (2012), tingkat kekayaan daerah dihitung menggunakan PAD dibandingkan dengan total pendapatan, maka tingkat kekayaan daerah diukur dengan rumus :

$$\text{Kekayaan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan}}$$

#### **Belanja Daerah**

Menurut Mustikarini (2012) dan Marfiana (2013) belanja daerah diprosikan dengan total realisasi belanja. Untuk mengetahui besarnya belanja setiap tahun, maka peneliti menggunakan perbandingan antara total realisasi belanja tahun lalu dengan total aset tahun sekarang.

#### **Ukuran Pemerintah Daerah**

Sesuai dengan penelitian Waliyyani (2015); Pratama et.al (2015); Kusumawardani (2012); dan Setyaningrum (2012), ukuran pemerintah daerah dapat dilihat dari total aset yang dimiliki. Untuk mengetahui besarnya total aset yang dimiliki setiap tahun, maka peneliti menggunakan perbandingan total aset tahun lalu dengan total aset tahun sekarang.

#### **Leverage**

Sesotyaningtyas (2012), dan kusumawardani (2012) menggunakan *debt to equity* yaitu perbandingan antara utang dengan modal. Berdasarkan penelitian Sumarjo (2010), Sesotyaningtyas (2012), dan Kusumawardana (2012), maka *leverage* dapat dituliskan dengan rumus :

$$\text{Leverage} = \frac{\text{Debt}}{\text{Equity}}$$



### ***Intergovernmental Revenue***

Setyaningrum (2012), Sesotyanyingtyas (2012), dan Sumarjo (2010) menghitung *intergovernmental revenue* dengan perbandingan antara dana perimbangan dengan total pendapatan. Berdasarkan penelitian tersebut, maka *Intergovernmental revenue* dapat dituliskan dengan rumus :

$$\text{Intergovernmental Revenue} = \frac{\text{Total Dana Perimbangan}}{\text{Total Pendapatan}}$$

### **Metode Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda (*multiple regression analysis*) yang digunakan untuk menguji hubungan sebuah variabel dependen dengan beberapa variabel independen. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$KKPD = \alpha + \beta_1KD + \beta_2BD + \beta_3UPD + \beta_4LE + \beta_5IR + e \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

KKPD = Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

$\alpha$  = Konstanta

$\beta$  = Koefisien regresi

KD = Tingkat Kekayaan Daerah

BD = Belanja Daerah

UPD = Ukuran Pemerintah Daerah

LE = *Leverage*

IR = *Intergovernmental Revenue*

e = Standar *error*

## **ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

### **Pengujian Hipotesis**

Tabel 4.6

Hasil Pengujian Regresi Linier Berganda Pengujian t Statistik

Varibel	<i>Coefficient</i>	Beta	t <sub>hitung</sub>	p	hasil
(Constant)	0,869		7,411	0,000	
KD	0,104	0,096	0,667	0,508	H <sub>1</sub> ditolak
BD	-0,083	-0,256	-2,388	0,020	H <sub>2</sub> diterima
UPD	0,378	0,579	5,319	0,000	H <sub>3</sub> diterima
LE	-1,285	-0,127	-1,175	0,245	H <sub>4</sub> ditolak
IR	0,040	0,039	0,267	0,790	H <sub>5</sub> ditolak
Adj. R <sup>2</sup>	= 0,352				
F <sub>hitung</sub>	= 7,409      p = 0,000				

Sumber: Data sekunder diolah, 2015

## Pembahasan

### **Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Pengaruh tingkat kekayaan daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2011-2013 diketahui bahwa hasil perhitungan diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 0,667 dengan nilai  $p= 0,508 > 0,05$ ; sehingga **H<sub>1</sub> ditolak**, artinya tingkat kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2011-2013. Kekayaan daerah menggambarkan tingkat kemakmuran suatu daerah (Sinaga dalam Setyaningrum, 2012). Menurut Pratama et.al (2015) dan Mustikarini (2012) kekayaan daerah dapat dilihat dari besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan sumber utama pembiayaan daerah. Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu dalam menggali sumber kekayaan yang ada untuk menjalankan roda perekonomian, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Menurut Julitawati et.al (2012) peningkatan PAD akan mengakibatkan peningkatan kinerja keuangan daerah. Hal tersebut dikarenakan pemerintah daerah menekankan hasil atas PAD mereka dari berbagai sumber yang dikelola oleh daerah dengan baik. Penelitian tersebut sejalan dengan yang dilakukan oleh Mustikarini & Debby (2012) bahwa semakin tinggi tingkat kekayaan daerah maka akan semakin tinggi skor kinerja daerah tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Penelitian Marfiana & Lulus (2013) menghasilkan bahwa tingkat kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa peran PAD dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah belum dapat berfungsi dengan semestinya (Sumardjo, 2010 dalam Marfiana & Lulus, 2013).

### **Pengaruh Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Pengaruh belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2011-2013 diketahui bahwa hasil perhitungan diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar -2,388 dengan nilai  $p= 0,020 < 0,05$ ; sehingga **H<sub>2</sub> diterima**, artinya belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2011-2013.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Pratama et.al (2015) yang menyebutkan bahwa belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak, dan mengembangkan sistem jaminan sosial. Semakin tinggi belanja daerah, pemerintah daerah akan memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkualitas kepada masyarakatnya.

### **Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2011-2013 diketahui bahwa hasil perhitungan diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar -5,319 dengan nilai  $p= 0,000 < 0,05$ ; sehingga **H<sub>3</sub> diterima**, artinya ukuran pemerintah daerah berpengaruh signifikan

terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2011-2013.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusumawardani (2012) dan Mustikarini & Debby (2012). Menurut Kusumawardani (2012), karena ukuran pemda yang besar akan dapat membantu kegiatan operasional pemerintah daerah yang diiringi dengan meningkatnya kinerja keuangan pemerintah daerah. Ukuran pemerintah daerah dapat dilihat dari total aset yang dimiliki. Pengukuran dengan total aset karena dianggap relatif stabil bila dibandingkan dengan nilai penjualan dan kapitalisasi pasar dalam mengukur size perusahaan (Nasser, 2009 dalam Kusumawardani, 2012). Dalam penelitian Mustikarini & Debby (2012) menyebutkan bahwa ukuran pemda berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Semakin besar ukuran pemerintah daerah, maka semakin tinggi kinerja yang dimiliki daerah tersebut.

### **Pengaruh *Leverage* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Pengaruh *leverage* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2011-2013 diketahui bahwa hasil perhitungan diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar -1,175 dengan nilai  $p = 0,245 > 0,05$ ; sehingga **H<sub>4</sub> ditolak**, artinya *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2011-2013.

*Leverage* merupakan besarnya aset daerah yang dibiayai oleh utang karena daerah tidak mampu membiayai urusan daerahnya melalui modal sendiri. Wild et.al (2005) dalam Kusumawardani (2012) *leverage* dapat diukur dengan *total debt ratio, total debt to equity, long-term debt to equity ratio*.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sesotyaningtyas & Febriyani (2012) yang menghasilkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, karena daerah memiliki dana internal yang kuat untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya tanpa bergantung pada pinjaman atau hutang dari pihak eksternal. Waliyyani & Amir (2015) membuktikan bahwa tidak ada pengaruh antara *leverage* dengan tingkat pengungkapan LKPD. Sejalan dengan penelitian Kusumawardani (2012) bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan karena *leverage* menunjukkan pendanaan utang terhadap modal. Menurut Sumarjo (2010) dalam Kusumawardani (2012) bahwa semakin besar *leverage* yang dimiliki oleh suatu entitas maka kinerjanya semakin buruk atau sebaliknya.

### **Pengaruh *Intergovernmental Revenue* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Pengaruh *intergovernmental revenue* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2011-2013 diketahui bahwa hasil perhitungan diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 0,267 dengan nilai  $p = 0,790 > 0,05$ ; sehingga **H<sub>5</sub> ditolak**, artinya *intergovernmental revenue* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2011-2013.

*Intergovernmental Revenue* adalah sejumlah transfer dana dari pusat yang sengaja dibuat untuk membiayai program-program pemerintah daerah, atau biasa disebut dengan dana perimbangan. Dana transfer tersebut akan digunakan oleh

daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi serta bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sosetyaningtyas & Febriani (2012), yang menyebutkan bahwa *Intergovernmental revenue* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah karena pemerintah daerah Kabupaten/kota belum dapat menggunakan dana dari pemerintah pusat dengan baik.

### **Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat kekayaan daerah, belanja daerah, ukuran pemerintah daerah, *leverage* dan *intergovernmental revenue* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil pengujian dan analisis atas data penelitian yang telah dilaksanakan, maka diperoleh kesimpulan bahwa variabel belanja daerah dan ukuran pemerintah daerah merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan tingkat kekayaan daerah, *leverage*, dan *intergovernmental revenue* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

### **Keterbatasan Penelitian**

Beberapa hal yang menjadikan adanya keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini terbatas pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh pemerintah daerah di Indonesia.
2. Periode pengamatan penelitian ini terbatas, sehingga sangat dimungkinkan akan memberikan hasil yang berbeda apabila periode pengamatan lebih panjang.

### **Saran**

Adanya berbagai keterbatasan dalam pelaksanaan penelitian ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk memperluas obyek penelitian dengan menambah beberapa kabupaten/kota di Jawa Tengah atau pada Provinsi yang lain, sehingga akan diperoleh hasil penelitian yang dapat digeneralisasikan untuk kinerja keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia.
2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan agar lebih meningkatkan kualitas penelitian dengan memperpanjang periode pengamatan, sehingga akan memperoleh data yang lebih detail dalam mempengaruhi kinerja pemerintah daerah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah & Febriansyah. 2015. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Bagian Selatan*. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi 18. Medan
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit UNDIP.
- Halim, A. dan Abdullah, S. 2006. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan* Vol. 2 No. 1.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Julitawati, Ebit., Darwanis, & Jalaluddin. 2012. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh*. Jurnal Akuntansi, Volume 1, No 1. Agustus Tahun 2012.
- Jogiyanto. 2004. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE.
- Kusumawardani, Media. 2012. *Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Accounting Analysis Journal 1. Universitas Negeri Semarang.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta.
- Marfiana, Nandhya dan Lulus Kurniasih. 2013. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Hasil Pemeriksaan Audit Bpk Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret : Surakarta.
- Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE
- Mustikarini, Widya Astuti & Debby Fitriyani. 2012. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007*. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XV : Banjarmasin.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

- \_\_\_\_\_. 2005. *PSAP Nomor 2, Paragraf 7. Tentang Belanja Daerah.*
- \_\_\_\_\_. 2006. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- \_\_\_\_\_. 2006. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.02/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan dan Mekanisme Pemantauan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pinjaman Daerah.*
- \_\_\_\_\_. 2007. *Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.*
- \_\_\_\_\_. 2008. *Undang-Undang No.12 Tahun 2008 tentang pemerintah daerah*
- \_\_\_\_\_. 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah untuk tujuan pelaporan keuangan*
- \_\_\_\_\_. 2010. *Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.*
- \_\_\_\_\_. 2011. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21. Tentang Klasifikasi Belanja Daerah.*
- \_\_\_\_\_. 2014. *Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.*
- Pratama, Kadek Aris Dwi., Desak Nyoman Sri Werastuti, & Edy Sujana. 2015. *Pengaruh Kompleksitas Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Daerah, Dan Belanja Daerah Terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 3, No.1 Tahun 2015.*
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods for Business : "Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Edisi 4. Jakarta : Salemba Empat.*
- Setyaningrum, Dyah & Febriyani Syafitri. 2012. *Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Volume 9, No.2 Tahun 2012.*

- Suhardjanto, Djoko & Rena Rukmita Yulianingtyas. 2011. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib Dalam Laporan Keuangan Daerah*. Jurnal Akuntansi & Auditing, Volume 8, No.1 Tahun 2011.
- Sumarjo, Hendro. 2010. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia*. Skripsi Sarjana. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Sesotyanningtyas, Mirna. 2012. *Pengaruh Leverage, Ukuran Legislatif, Intergovernmental Revenue dan Pendapatan Pajak Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Accounting Analysis Journal, Volume 1, No.1 Tahun 2012.
- Waliyyani, Ghaniyyu Mintotik & Amir Mahmud. 2015. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Accounting Analysis Journal, Volume 4, No.2 Tahun 2015.